
**Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Berbasis Nilai Syariah Melalui
Pendampingan Umkm Dan Revitalisasi Sarana Ibadah Di Desa Jatisari**

**Nur Afriyani¹, Saepul Bahri², Toha Misbahul Aska³, Muhammad Ervan
Azhari⁴, Pebriyansah⁵, Ina Sabrina Solihat⁶, Sawqi Saad El Hasan⁷, Samsul Arifin⁸**
^{1,2,3,4,5,6,7,8} STEBIS Bina Mandiri Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia
nurafriyani0425@gmail.com

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal memerlukan intervensi yang menanggapi kebutuhan ekonomi sekaligus kondisi sosial komunitas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta penguatan kebersihan sarana ibadah berbasis nilai syariah di RW 002 Desa Jatisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Kegiatan dilaksanakan pada Mei 2026 menggunakan pendekatan pengabdian partisipatif berbasis kebutuhan dengan strategi kunjungan langsung. Tahapan kegiatan meliputi pemetaan dan verifikasi usaha, asesmen kebutuhan, penentuan bentuk pendampingan, pelaksanaan, verifikasi luaran, serta refleksi. Dari 24 usaha yang teridentifikasi, 22 masih aktif dan 11 tercatat bersedia menerima sedikitnya satu bentuk pendampingan. Capaian program meliputi peningkatan penggunaan QRIS dari 7 menjadi 11 UMKM, keterdaftaran lokasi usaha di *Google Maps* dari 10 menjadi 20 UMKM, kepemilikan Nomor Induk Berusaha dari 5 menjadi 9 UMKM dan kepemilikan *banner* dari 13 menjadi 16 UMKM. Lima buku kas sederhana juga diserahkan disertai edukasi pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga. Pada dimensi sosial, kegiatan kerja bakti dan penyediaan perlengkapan kebersihan dilaksanakan di Masjid Jami' Jasim Muhammad. Pendampingan berbasis kebutuhan menghasilkan luaran digitalisasi, legalitas, identitas usaha, dan penguatan fasilitas sosial yang dapat dihubungkan dengan nilai amanah, transparansi, kepatuhan, dan kemaslahatan. Meskipun demikian, evaluasi jangka pendek ini belum mengukur perubahan omzet, jumlah pelanggan, konsistensi pencatatan, maupun keberlanjutan pemeliharaan sarana ibadah.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat; UMKM; digitalisasi; legalitas usaha; nilai syariah; sarana ibadah

ABSTRACT

Community empowerment at the local level requires interventions that respond to both economic needs and the social conditions of the community. This community engagement program aimed to describe and analyze assistance for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and the improvement of worship-facility cleanliness based on Islamic values in RW 002, Jatisari Village, Cileungsi District, Bogor Regency. Conducted in May 2026, the program employed a participatory, needs-based approach through direct visits. The stages comprised business mapping and verification, needs assessment, intervention selection, implementation, output verification, and reflection. Of 24 businesses identified, 22 were active and 11 agreed to receive at least one form of assistance. The program increased QRIS adoption from 7 to 11 MSMEs, Google Maps registration from 10 to 20 MSMEs, Business Identification Number

ownership from 5 to 9 MSMEs, and business-banner ownership from 13 to 16 MSMEs. Five simple cashbooks were also distributed alongside guidance on separating business and household finances. In the social dimension, a community clean-up and the provision of cleaning equipment were carried out at Jami Jasim Muhammad Mosque. The needs-based assistance produced outputs in digitalization, business legality, business identity, and social-facility improvement, reflecting the values of trustworthiness, transparency, compliance, and public benefit. However, this short-term evaluation did not measure changes in revenue, customer numbers, consistent bookkeeping, or the sustainability of worship-facility maintenance.

Keywords: *community empowerment; MSMEs; digitalization; business legality; Islamic values; worship facilities*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses penguatan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengenali kebutuhan, mengelola sumber daya, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara lebih mandiri. Pada tingkat desa, proses tersebut tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan penguatan lingkungan sosial yang menopang kehidupan bersama. Karena itu, program pengabdian kepada masyarakat memerlukan pendekatan yang mempertemukan pengembangan usaha dengan pemeliharaan fasilitas sosial dan keagamaan yang digunakan warga.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan pendapatan rumah tangga. Namun, keterbatasan legalitas, visibilitas usaha, sistem pembayaran, serta administrasi keuangan masih menjadi hambatan bagi sebagian pelaku usaha. Azizah et al. (2024) menegaskan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia, sedangkan Paransa (2024) menunjukkan pentingnya pemasaran digital dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan daya saing UMKM. Legalitas melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) juga menjadi prasyarat administratif yang dapat memudahkan pelaku usaha mengakses program pembinaan dan pengembangan (Fadilah et al., 2024).

Transformasi digital pada UMKM tidak selalu memerlukan teknologi yang kompleks. Pencantuman lokasi di Google Maps membantu usaha lebih mudah ditemukan, sedangkan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) menyediakan alternatif pembayaran nontunai. Studi Gainau dan Engk (2024) serta Sholihah dan Nurhapsari (2023) memperlihatkan bahwa manfaat yang dirasakan dan kemudahan penggunaan berperan dalam adopsi QRIS. Meskipun demikian, penyediaan fasilitas digital tidak serta-merta meningkatkan omzet. Pengaruh ekonominya bergantung pada penggunaan secara berkelanjutan, kesesuaian dengan karakter konsumen, dan kemampuan pelaku usaha mengintegrasikannya ke dalam praktik sehari-hari.

Selain digitalisasi dan legalitas, pencatatan keuangan sederhana merupakan fondasi pengelolaan usaha. Pemisahan uang usaha dan rumah tangga membantu pelaku UMKM melihat arus kas secara lebih jelas. Identitas visual melalui banner juga dapat memperjelas keberadaan dan informasi usaha. Keempat unsur seperti akses pembayaran, visibilitas lokasi, legalitas dan administrasi tidak selalu dibutuhkan dalam tingkat yang sama oleh setiap pelaku usaha. Pendampingan yang menyeragamkan intervensi berisiko tidak sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan masing-masing mitra.

Sedangkan di dalam perspektif nilai syariah, pemberdayaan usaha tidak berhenti pada bertambahnya fasilitas ekonomi. Amanah menuntut pengelolaan usaha secara bertanggung jawab; transparansi tercermin dalam keterbukaan transaksi dan pencatatan; kepatuhan berkaitan dengan pemenuhan ketentuan legal; di sisi lain kemaslahatan mengarahkan kegiatan ekonomi agar memberi manfaat bagi pelaku usaha, konsumen dan masyarakat. Nilai-nilai tersebut juga mencakup tanggung jawab sosial terhadap fasilitas bersama, termasuk kebersihan dan kenyamanan sarana ibadah.

Hasil pemetaan awal di RW 002 Desa Jatisari menemukan 24 usaha. Setelah verifikasi, 22 usaha masih aktif, sedangkan dua usaha tidak beroperasi atau tidak dapat dijangkau selama kegiatan. Pada kondisi awal, 7 UMKM menggunakan QRIS, 10 UMKM tercantum di *Google Maps*, 5 memiliki NIB dan 13 memiliki *banner*. Kebutuhan setiap pelaku usaha berbeda, sementara sebagian pemilik belum bersedia menerima pendampingan karena merasa fasilitas yang ditawarkan belum diperlukan atau belum siap memenuhi persyaratan administratif. Pada dimensi sosial, Masjid Jami' Jasim Muhammad menghadapi keterbatasan perlengkapan kebersihan sehingga dipilih sebagai sasaran kegiatan kerja bakti dan penyediaan sarana kebersihan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kelompok 05 KKN STEBIS Bina Mandiri menerapkan pendampingan berbasis kebutuhan dengan strategi kunjungan langsung. Kebaruan praktis kegiatan terletak pada diferensiasi intervensi. Setiap mitra menerima bantuan sesuai kesenjangan kapasitasnya, bukan paket program yang sama. Program ekonomi kemudian dipadukan dengan kegiatan penguatan sarana ibadah sebagai wujud pemberdayaan sosial berbasis kemaslahatan. Kegiatan ini bertujuan (1) memetakan kebutuhan digitalisasi, legalitas, identitas, dan administrasi UMKM; (2) melaksanakan pendampingan sesuai kebutuhan mitra; (3) mendeskripsikan perubahan luaran sebelum dan setelah pendampingan; serta (4) menjelaskan keterkaitan program ekonomi dan sosial dengan nilai amanah, transparansi, kepatuhan dan kemaslahatan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Service-Learning* yang mengintegrasikan proses pembelajaran mahasiswa dengan pelayanan untuk memecahkan permasalahan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan Kuliah Kerja Nyata tidak hanya diarahkan pada penyelesaian program kerja, tetapi juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan Manajemen Bisnis Syariah dan Akuntansi Syariah dalam mendampingi pelaku usaha serta memperkuat fasilitas sosial masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan juga mengadopsi prinsip partisipatif berbasis kebutuhan (*participatory needs-based approach*). Pendekatan tersebut menempatkan kondisi, kebutuhan, dan kesediaan mitra sebagai dasar penentuan bentuk pendampingan. Mitra tidak menerima paket intervensi yang seragam, tetapi memperoleh pendampingan sesuai kesenjangan kapasitas masing-masing, meliputi pendaftaran QRIS, pencantuman lokasi usaha di *Google Maps*, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pembuatan banner, dan pengenalan buku kas sederhana.

Pada dimensi sosial, pendekatan tersebut dikombinasikan dengan aksi komunitas (*community action*) melalui kerja bakti dan penyediaan perlengkapan kebersihan di Masjid Jami' Jasim Muhammad. Kombinasi tersebut digunakan agar kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan fasilitas ekonomi bagi UMKM, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan sarana bersama. Proses *Service-Learning* mencakup identifikasi kebutuhan, persiapan program, pelaksanaan tindakan, verifikasi luaran, dan refleksi terhadap hasil serta keterbatasan kegiatan.

1. Subjek dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di RW 002 Desa Jatisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, pada Mei 2026. Subjek program ekonomi adalah pelaku UMKM yang ditemukan dalam pemetaan wilayah. Berdasarkan pemetaan awal, terdapat 24 usaha yang teridentifikasi. Setelah dilakukan verifikasi lapangan, sebanyak 22 usaha dinyatakan masih aktif, sedangkan dua usaha tidak beroperasi atau tidak dapat dijangkau selama pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan rekapitulasi status mitra, 11 usaha aktif tercatat bersedia menerima sedikitnya satu bentuk pendampingan. Sebelas usaha aktif lainnya belum mengikuti pendampingan karena belum bersedia, telah memiliki fasilitas tertentu, atau belum memerlukan bentuk fasilitasi yang ditawarkan. Kesiapan mengikuti kegiatan dijadikan salah satu pertimbangan agar pendampingan dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak mengabaikan keputusan pemilik usaha.

Sasaran program ekonomi adalah tersedianya fasilitas digital, legalitas, identitas, dan administrasi sederhana yang sesuai dengan kebutuhan setiap mitra. Fasilitas tersebut meliputi *QRIS* sebagai alternatif pembayaran, *Google Maps* untuk informasi lokasi usaha, NIB sebagai legalitas administratif, *banner* sebagai identitas visual, serta buku kas sederhana sebagai instrumen awal pencatatan keuangan.

Subjek program sosial adalah pengurus dan warga yang terlibat dalam pemeliharaan Masjid Jami' Jasim Muhammad. Sasaran program sosial adalah terlaksananya kegiatan kerja bakti dan tersedianya perlengkapan kebersihan tambahan. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung kebersihan dan kenyamanan sarana ibadah sekaligus memperkuat tanggung jawab terhadap fasilitas bersama.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui lima tahapan, yaitu pemetaan awal, verifikasi dan asesmen kebutuhan, pelaksanaan pendampingan, verifikasi luaran, serta aksi sosial dan refleksi.

a. Pemetaan awal

Pemetaan awal dilaksanakan pada 3 Mei 2026. Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama Ketua RW 002 untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi wilayah, keberadaan pelaku UMKM, dan fasilitas sosial yang memerlukan perhatian. Tim kemudian melakukan survei wilayah untuk mengidentifikasi lokasi usaha dan meninjau kondisi Masjid Jami' Jasim Muhammad.

Tahap ini menghasilkan daftar awal usaha yang berpotensi menjadi mitra serta identifikasi awal keterbatasan perlengkapan kebersihan masjid. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan kunjungan dan verifikasi pada tahap berikutnya.

b. Verifikasi dan asesmen kebutuhan

Verifikasi dan asesmen kebutuhan dilakukan pada 10 Mei 2026 melalui kunjungan langsung ke tempat usaha. Tim memeriksa status operasional setiap usaha dan mengidentifikasi fasilitas yang telah dimiliki maupun masih dibutuhkan. Asesmen mencakup penggunaan *QRIS*, keterdaftaran lokasi usaha di *Google Maps*, kepemilikan NIB, kepemilikan banner, dan kebutuhan buku kas sederhana.

Pada tahap ini, tim juga menyampaikan rencana kegiatan kepada pemilik usaha dan meminta kesediaan mereka untuk mengikuti pendampingan. Hasil asesmen digunakan untuk menyusun matriks kebutuhan mitra sehingga bentuk pendampingan dapat ditentukan secara berbeda pada setiap UMKM.

c. Pelaksanaan pendampingan

Pendampingan dilaksanakan pada 17 Mei 2026. Tim mahasiswa dibagi menjadi dua kelompok untuk melakukan kunjungan langsung kepada mitra yang bersedia. Pembagian tim dilakukan untuk menyesuaikan keterbatasan waktu dengan persebaran lokasi usaha.

Pendampingan *QRIS* mencakup penjelasan fungsi pembayaran nontunai serta bantuan dalam proses pendaftaran atau aktivasi. Pendampingan *Google Maps* dilakukan melalui pembuatan atau pencantuman titik lokasi usaha beserta informasi dasar yang diperlukan. Pendampingan NIB mencakup pengumpulan persyaratan dan bantuan input data melalui sistem *Online Single Submission*.

Pada aspek identitas usaha, tim membantu penyusunan dan pembuatan banner bagi mitra yang belum memilikinya. Sementara itu, pada aspek administrasi keuangan, mitra yang membutuhkan memperoleh buku kas sederhana dan penjelasan awal mengenai pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga.

d. Verifikasi dan penyerahan luaran

Verifikasi luaran dilakukan pada 24 Mei 2026. Tim mengunjungi kembali mitra untuk memeriksa fasilitas yang telah berhasil dibuat, diaktifkan, atau diterbitkan. Verifikasi dilakukan terhadap *QRIS*, keterdaftaran lokasi pada *Google Maps*, dokumen NIB, *banner* dan buku kas.

Pada tahap ini, atribut fisik seperti banner dan buku kas diserahkan kepada mitra. Verifikasi diperlukan agar capaian program tidak hanya didasarkan pada kegiatan pendampingan, tetapi pada luaran yang benar-benar tersedia.

e. Aksi sosial dan refleksi

Program sosial dilaksanakan pada 31 Mei 2026 melalui kegiatan kerja bakti di Masjid Jami Jasim Muhammad. Kegiatan meliputi pembersihan area masjid serta penyerahan perlengkapan kebersihan tambahan kepada pengurus.

Setelah pelaksanaan kegiatan, tim melakukan refleksi terhadap proses, hasil, hambatan, dan kemungkinan keberlanjutan program. Refleksi mahasiswa merupakan bagian penting dari pendekatan *Service-Learning* karena membantu menghubungkan pengalaman lapangan dengan pengetahuan Manajemen Bisnis Syariah dan Akuntansi Syariah. Refleksi juga digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan kesiapan mitra, keterbatasan waktu, kendala administratif, dan kebutuhan pemantauan lanjutan.

Tabel 1. Tahapan, Teknik Pengumpulan Data dan Luaran Kegiatan

Tahap	Waktu	Kegiatan utama	Teknik pengumpulan dan verifikasi data	Luaran
Pemetaan awal	3 Mei 2026	Koordinasi dengan Ketua RW, survei wilayah, identifikasi UMKM, dan peninjauan sarana ibadah	Observasi, percakapan awal, dan dokumentasi	Daftar awal usaha dan identifikasi masalah fasilitas sosial
Verifikasi dan asesmen kebutuhan	10 Mei 2026	Verifikasi status usaha serta identifikasi kebutuhan QRIS, Google Maps, NIB, banner, dan buku kas	Observasi, percakapan terarah, dan lembar asesmen kebutuhan	Daftar usaha aktif, kesediaan mitra, dan matriks kebutuhan
Pelaksanaan pendampingan	17 Mei 2026	Pendampingan digitalisasi, legalitas, identitas, dan administrasi usaha	Dokumentasi proses dan pemeriksaan persyaratan	Proses pendaftaran atau pembuatan fasilitas UMKM
Verifikasi dan penyerahan luaran	24 Mei 2026	Pemeriksaan fasilitas yang telah dibuat atau diterbitkan dan penyerahan atribut fisik	Pemeriksaan QRIS, tautan Google Maps, NIB, banner, buku kas, dan dokumentasi	Luaran pendampingan UMKM yang dapat diverifikasi
Aksi sosial dan refleksi	31 Mei 2026	Kerja bakti, penyerahan perlengkapan kebersihan, dan refleksi kegiatan	Observasi, dokumentasi, dan catatan refleksi	Penguatan kebersihan sarana ibadah dan hasil refleksi kegiatan

Sumber: Dokumentasi kegiatan KKN Kelompok 05, 2026.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Verifikasi Luaran

Data kegiatan diperoleh melalui observasi lapangan, percakapan terarah, asesmen kebutuhan, pemeriksaan dokumen atau fasilitas, dokumentasi dan refleksi tim.

Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan dan status operasional usaha, fasilitas yang telah dimiliki, serta kondisi sarana ibadah. Percakapan terarah dilakukan kepada pelaku usaha, Ketua RW, dan pengurus masjid untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan, kesediaan mengikuti kegiatan, serta hambatan yang dihadapi.

Asesmen kebutuhan digunakan untuk mengelompokkan bentuk pendampingan yang diperlukan setiap mitra. Aspek yang diperiksa meliputi

kepemilikan *QRIS*, *Google Maps*, NIB, *banner* dan buku kas. Hasil asesmen tidak digunakan untuk memberikan semua bentuk intervensi kepada seluruh UMKM, tetapi untuk menentukan bantuan yang paling sesuai bagi setiap mitra. Verifikasi luaran dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:

1. *QRIS* yang telah didaftarkan atau diaktifkan;
2. lokasi usaha yang telah tercantum pada *Google Maps*;
3. dokumen NIB yang telah terbit;
4. *banner* yang telah selesai dibuat dan diserahkan;
5. buku kas yang telah diserahkan kepada mitra;
6. pelaksanaan kerja bakti dan penyerahan perlengkapan kebersihan masjid.

Dokumentasi berupa foto kegiatan, tangkapan layar, dokumen, dan bukti penyerahan digunakan untuk memperkuat hasil verifikasi. Data pribadi pada dokumen NIB, *QRIS* dan tangkapan layar digital perlu disamarkan sebelum dimasukkan ke dalam artikel.

4. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan disusun pada tingkat proses dan output awal. Program ekonomi dinyatakan terlaksana apabila terjadi penambahan fasilitas digital, legalitas, identitas, atau administrasi usaha pada mitra yang membutuhkan. Indikator yang digunakan meliputi:

Tabel 2 Indikator Keberhasilan

Dimensi	Indikator keberhasilan	Cara verifikasi
Partisipasi	Mitra bersedia menerima sedikitnya satu bentuk pendampingan	Daftar keikutsertaan dan dokumentasi
Pembayaran digital	<i>QRIS</i> baru tersedia atau aktif	Pemeriksaan fasilitas <i>QRIS</i>
Visibilitas usaha	Lokasi usaha tercantum di <i>Google Maps</i>	Pemeriksaan tautan atau profil lokasi
Legalitas	NIB telah diterbitkan	Pemeriksaan dokumen NIB
Identitas usaha	<i>Banner</i> selesai dibuat dan diserahkan	Dokumentasi pemasangan atau penyerahan
Administrasi keuangan	Buku kas diserahkan disertai edukasi pencatatan	Dokumentasi dan bukti penyerahan
Sarana ibadah	Kerja bakti terlaksana dan perlengkapan kebersihan tersedia	Observasi dan dokumentasi
Refleksi pembelajaran	Mahasiswa dapat mengidentifikasi hasil, hambatan dan tindak lanjut	Catatan refleksi tim

Indikator tersebut mengukur keterlaksanaan dan ketersediaan luaran. Indikator ini belum digunakan untuk menyimpulkan peningkatan omzet, pertambahan jumlah pelanggan, perubahan kebiasaan transaksi, konsistensi pencatatan, ataupun peningkatan kepedulian masyarakat secara permanen karena dampak tersebut memerlukan evaluasi lanjutan.

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan membandingkan jumlah fasilitas yang dimiliki UMKM sebelum dan setelah pendampingan. Perbandingan tersebut mencakup penggunaan *QRIS*, keterdaftaran di *Google Maps*, kepemilikan NIB, dan kepemilikan *banner*. Buku kas dianalisis berdasarkan jumlah yang diserahkan karena data kepemilikannya sebelum kegiatan belum direkap secara khusus.

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan menelaah hasil observasi, percakapan terarah, dokumentasi, dan refleksi tim. Data dikelompokkan berdasarkan kebutuhan mitra, proses pendampingan, luaran kegiatan, hambatan pelaksanaan, dan kebutuhan keberlanjutan. Data program sosial dianalisis berdasarkan keterlaksanaan kerja bakti, penyediaan perlengkapan kebersihan, dan bentuk keterlibatan pihak setempat.

Hasil kegiatan selanjutnya diinterpretasikan menggunakan empat nilai syariah, yaitu amanah, transparansi, kepatuhan, dan kemaslahatan. Amanah dianalisis melalui kesesuaian intervensi dengan kebutuhan dan kesediaan mitra. Transparansi dikaitkan dengan edukasi pencatatan keuangan. Kepatuhan dilihat melalui penerbitan NIB, sedangkan kemaslahatan dianalisis melalui tersedianya fasilitas yang mendukung kegiatan usaha dan kebersihan sarana ibadah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemetaan Kondisi dan Kebutuhan Mitra

Pemetaan awal mengidentifikasi 24 usaha di RW 002 Desa Jatisari. Setelah verifikasi lapangan, 22 usaha dinyatakan masih aktif, sedangkan dua usaha tidak aktif atau tidak dapat dijangkau selama kunjungan. Berdasarkan rekapitulasi status pada data lapangan, 11 usaha aktif tercatat bersedia menerima sedikitnya satu bentuk pendampingan. Sebelas usaha aktif lainnya belum bersedia atau menyatakan belum memerlukan bentuk fasilitasi yang ditawarkan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan usaha aktif tidak identik dengan kesiapan mengikuti program. Sebagian pelaku usaha telah memiliki fasilitas tertentu, sedangkan sebagian lain belum melihat kebutuhan untuk melakukan formalisasi atau digitalisasi. Karena itu, kesediaan mitra diperlakukan sebagai bagian dari kondisi awal, bukan sebagai ukuran kemauan untuk berkembang. Pendekatan ini menghormati otonomi pemilik usaha sekaligus menghindari pemberian intervensi yang tidak dibutuhkan.

Tabel 3. Rekapitulasi status usaha sasaran

Kategori	Jumlah	Keterangan
Usaha teridentifikasi	24	Seluruh usaha yang ditemukan pada pemetaan awal
Usaha aktif	22	Masih beroperasi pada masa verifikasi
Tidak aktif/tidak dapat dijangkau	2	Tidak beroperasi atau pemilik berada di luar daerah
Bersedia mengikuti pendampingan	11	Menerima sedikitnya satu bentuk fasilitasi
Belum bersedia/belum membutuhkan	11	Belum menerima fasilitasi pada periode kegiatan

Sumber: Diolah dari Tabel Identitas UMKM sasaran KKN Kelompok 05, 2026.

2. Pendampingan Digitalisasi, Legalitas dan Identitas Usaha

Pendampingan dilaksanakan secara berbeda sesuai kebutuhan tiap mitra. Tim dibagi menjadi dua kelompok untuk melakukan kunjungan dan pengumpulan persyaratan. Proses teknis yang memerlukan waktu lebih panjang, seperti input NIB melalui *Online Single Submission*, dilanjutkan setelah data pemilik diterima. Sedangkan untuk *Google Maps*, tim membantu pembuatan atau penandaan lokasi usaha. Pada *QRIS*, pendampingan diarahkan pada proses pendaftaran dan aktivasi. *Banner* dibuat untuk usaha yang belum memiliki identitas visual, sedangkan buku kas diberikan bersama penjelasan pemisahan uang usaha dan rumah tangga.



Gambar 1. Pelaksanaan pendampingan UMKM berbasis kebutuhan di RW 002 Desa Jatisari

Sumber: Dokumentasi KKN Kelompok 05, Mei 2026.

Perbandingan kondisi awal dan akhir memperlihatkan kenaikan pada seluruh indikator yang dipantau. Pengguna *QRIS* meningkat dari 7 UMKM menjadi 11 UMKM. Lokasi usaha yang tercantum di *Google Maps* bertambah dari 10 menjadi 20

usaha. Kepemilikan NIB meningkat dari 5 UMKM menjadi 9 UMKM, sedangkan kepemilikan banner meningkat dari 13 UMKM menjadi 16 UMKM. Lima buku kas juga diserahkan kepada mitra yang membutuhkan.

Tabel 4. Capaian pendampingan UMKM

Indikator	Sebelum	Tambahan	Sesudah	Interpretasi output
Pengguna QRIS	7	4	11	Empat fasilitas pembayaran baru tersedia
Lokasi di Google Maps	10	10	20	Sepuluh lokasi usaha baru tercantum
Kepemilikan NIB	5	4	9	Empat dokumen legalitas baru terbit
Kepemilikan banner	13	3	16	Tiga identitas visual baru tersedia
Buku kas	Tidak direkap	5	5 diserahkan	Lima mitra memperoleh instrumen pencatatan

Sumber: Data pelaksanaan KKN Kelompok 05, 2026. Angka menunjukkan ketersediaan fasilitas, bukan perubahan omzet atau jumlah pelanggan.

Penambahan sepuluh lokasi di Google Maps merupakan capaian kuantitatif terbesar. Hasil ini memperlihatkan bahwa hambatan pendaftaran lokasi dapat dikurangi melalui bantuan langsung. Secara fungsional, keterdaftaran tersebut menyediakan akses informasi lokasi bagi calon konsumen. Namun, program belum mengukur penayangan profil, permintaan rute, panggilan, maupun kunjungan konsumen, sehingga hasilnya belum dapat ditafsirkan sebagai peningkatan pasar atau penjualan. Sikap ini penting agar evaluasi tidak mencampuradukkan ketersediaan instrumen dengan dampak ekonomi.

Penambahan empat pengguna QRIS memperluas pilihan pembayaran pada usaha mitra. Temuan ini sejalan dengan Sholihah dan Nurhapsari (2023), yang menekankan peran persepsi manfaat dan kemudahan dalam penerimaan pembayaran digital. Gainau dan Engk (2024) juga menunjukkan relevansi QRIS bagi pengembangan UMKM. Akan tetapi, kegiatan ini belum memperoleh data volume atau frekuensi transaksi QRIS. Oleh sebab itu, capaian yang dapat dipastikan adalah tersedianya fasilitas pembayaran, bukan perubahan kebiasaan transaksi atau peningkatan pendapatan.



Gambar 2: Luaran pendampingan UMKM

Sumber: Dokumentasi KKN Kelompok 05, Mei 2026.

Empat NIB yang terbit menunjukkan bahwa pendampingan langsung dapat membantu mengurangi hambatan administratif. Fadilah et al. (2024) menempatkan NIB sebagai instrumen legalitas yang penting bagi pelaku usaha. Berdasarkan program ini, NIB dipahami sebagai penguatan status administratif dan prasyarat untuk mengakses layanan pengembangan tertentu. Program belum menelusuri apakah mitra kemudian memperoleh pembiayaan, sertifikasi dan pembinaan dari pemerintah, sehingga manfaat lanjutan tersebut diposisikan sebagai peluang, bukan sebagai hasil yang telah terjadi.

Tiga *banner* baru dan lima buku kas merupakan bentuk penguatan identitas serta administrasi internal. *Banner* membantu menampilkan nama atau informasi usaha secara lebih jelas, tetapi daya tarik visual dan pengaruhnya terhadap keputusan konsumen belum diukur. Demikian pula pada saat penyerahan buku kas baru yang merupakan *input* awal. Keberhasilan administrasi keuangan memerlukan pemantauan apakah pencatatan benar-benar dilakukan secara teratur dan digunakan dalam pengambilan keputusan usaha.

3. Revitalisasi Sarana Ibadah sebagai Dimensi Sosial

Dimensi sosial program diwujudkan melalui kerja bakti membersihkan Masjid Jami' Jasim Muhammad dan penyediaan perlengkapan kebersihan. Kegiatan ini merespons keterbatasan sarana yang ditemukan pada observasi awal. Luaran yang dapat diverifikasi adalah terlaksananya pembersihan area masjid dan tersedianya perlengkapan kebersihan tambahan. Hal tersebut karena tidak terdapat pengukuran kondisi kebersihan sebelum dan setelah kegiatan maupun pemantauan penggunaan alat, program ini belum dapat menyimpulkan peningkatan kepedulian masyarakat secara permanen.



Gambar 3. Revitalisasi sarana ibadah

Sumber: Sumber: Dokumentasi KKN Kelompok 05, Mei 2026.

Meskipun berskala sederhana, kegiatan tersebut memperluas makna pemberdayaan dari peningkatan kapasitas ekonomi menuju pemeliharaan fasilitas bersama. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial warga. Oleh karena itu, kerja bakti dan penyediaan sarana kebersihan dapat dipahami sebagai stimulus tanggung jawab kolektif. Keberlanjutannya tetap memerlukan pembagian tanggung jawab kepada pengurus atau warga setelah kegiatan KKN berakhir.

4. Integrasi Nilai Syariah dalam Program Ekonomi dan Sosial

Nilai syariah dalam kegiatan ini tidak diperlakukan sebagai label, melainkan diterjemahkan ke dalam tindakan dan indikator yang dapat diamati. Hubungan tersebut diringkas pada Tabel 4.

Tabel 5. Operasionalisasi nilai syariah dalam kegiatan

Nilai	Bentuk operasional	Indikator yang diamati	Batas interpretasi
Amanah	Penggunaan data dan fasilitas sesuai kebutuhan mitra	Pendampingan dilakukan atas kesediaan pemilik	Belum mengukur konsistensi penggunaan
Transparansi	Pengenalan buku kas dan pemisahan keuangan	Lima buku kas diserahkan disertai edukasi	Belum memantau disiplin pencatatan
Kepatuhan	Pendampingan legalitas usaha	Empat NIB baru terbit	Belum menilai pemanfaatan legalitas lanjutan

Nilai	Bentuk operasional	Indikator yang diamati	Batas interpretasi
Kemaslahatan	Kemudahan transaksi, informasi lokasi, identitas usaha, dan kebersihan masjid	QRIS, Google Maps, banner dan perlengkapan kebersihan tersedia	Belum mengukur dampak ekonomi dan sosial jangka panjang

Sumber: Analisis tim KKN Kelompok 05, 2026.

Amanah terlihat dari upaya menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan dan kesediaan mitra. Transparansi diarahkan melalui edukasi pencatatan, tetapi tidak dapat dinyatakan berhasil hanya karena buku kas telah dibagikan. Kepatuhan diwujudkan secara paling konkret melalui terbitnya NIB. Sementara itu, kemaslahatan menjadi penghubung antara program ekonomi dan sosial: fasilitas usaha ditujukan untuk memudahkan kegiatan ekonomi, sedangkan kerja bakti dan perlengkapan kebersihan ditujukan untuk memperbaiki fasilitas bersama.

Kerangka tersebut juga menunjukkan bahwa nilai syariah harus diuji melalui praktik berkelanjutan. QRIS tidak otomatis menghilangkan seluruh ketidakpastian transaksi, NIB tidak otomatis menjadikan usaha berkembang dan pemberian buku kas tidak otomatis menghasilkan transparansi. Nilai baru memperoleh makna substantif apabila fasilitas digunakan secara konsisten, informasi diberikan secara benar, kewajiban dipenuhi dan manfaatnya dirasakan tanpa merugikan pihak lain.

5. Faktor Pendukung, Hambatan dan Keberlanjutan

Pelaksanaan program didukung oleh koordinasi dengan Ketua RW 002, keterbukaan sebagian pelaku usaha, dukungan pengurus masjid dan akses wilayah yang memungkinkan kunjungan langsung. Pembagian mahasiswa menjadi dua tim membantu pelaksanaan asesmen dan pendampingan dalam waktu terbatas. Strategi kunjungan langsung juga mengurangi kebutuhan mitra untuk meninggalkan tempat usaha.

Hambatan utama adalah singkatnya masa kegiatan, perbedaan kesiapan pelaku usaha, keterbatasan persyaratan administratif dan belum tersedianya evaluasi lanjutan. Sebagian pemilik belum bersedia menerima pendampingan. Kondisi tersebut tidak tepat dipahami semata-mata sebagai resistensi terhadap kemajuan, melainkan dapat berkaitan dengan persepsi kebutuhan, kekhawatiran administratif, pengalaman digital, waktu, atau prioritas usaha.

Keberlanjutan program memerlukan pemantauan bertahap. Bagi UMKM, pemantauan dapat mencakup status aktif QRIS, analitik Google Maps, penggunaan NIB, penggunaan banner dan keteraturan pencatatan selama sedikitnya tiga bulan. Sedangkan untuk sarana ibadah, pengurus perlu menetapkan penanggung jawab, jadwal kebersihan dan inventaris perlengkapan. Data tindak lanjut tersebut akan memungkinkan evaluasi bergerak dari *output* menuju *outcome* awal.

Kegiatan ini memiliki empat keterbatasan. Pertama, masa pelaksanaan hanya satu bulan sehingga belum cukup untuk menilai keberlanjutan penggunaan fasilitas. Kedua, evaluasi berfokus pada jumlah output dan belum mengukur omzet, jumlah pelanggan, transaksi digital, atau perubahan kemampuan pengelolaan. Ketiga, tidak

seluruh usaha aktif bersedia mengikuti program sehingga hasil tidak mewakili semua UMKM di RW 002 Desa Jatisari. Keempat, kegiatan sarana ibadah belum menggunakan instrumen penilaian kondisi awal dan akhir. Oleh karena itu, hasil artikel harus dibaca sebagai capaian implementasi dan *output* awal, bukan bukti dampak ekonomi atau sosial jangka panjang.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian Kelompok 05 KKN STEBIS Bina Mandiri mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui pendampingan UMKM serta penguatan kebersihan sarana ibadah di RW 002 Desa Jatisari. Dari 24 usaha yang teridentifikasi, 22 masih aktif dan 11 tercatat bersedia menerima sedikitnya satu bentuk pendampingan. Pendekatan berbasis kebutuhan memungkinkan setiap mitra memperoleh intervensi yang berbeda sesuai kesenjangan kapasitasnya.

Program menghasilkan penambahan empat pengguna QRIS, sepuluh lokasi usaha di *Google Maps*, empat NIB, tiga *banner*, serta penyerahan lima buku kas. Pada dimensi sosial, kerja bakti dan penyediaan perlengkapan kebersihan dilaksanakan di Masjid Jami' Jasim Muhammad. Luaran tersebut mencerminkan upaya mengoperasionalkan nilai amanah, transparansi, kepatuhan dan kemaslahatan. Namun, program belum membuktikan peningkatan omzet, penambahan pelanggan, perubahan kebiasaan pencatatan, ataupun keberlanjutan kebersihan masjid.

Pendampingan berikutnya perlu melakukan evaluasi tiga hingga enam bulan setelah kegiatan, mendokumentasikan penggunaan setiap fasilitas, serta melibatkan pengurus lingkungan dalam pemantauan. Berdasarkan tindak lanjut tersebut, program dapat berkembang dari penyediaan fasilitas menuju pemberdayaan ekonomi dan sosial yang lebih berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim KKN Kelompok 05 menyampaikan terima kasih kepada STEBIS Bina Mandiri, Ketua RW 002 Desa Jatisari, pengurus Masjid Jami' Jasim Muhammad, seluruh pelaku UMKM mitra, serta warga yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Segala bentuk dukungan, waktu dan keterbukaan para mitra memungkinkan kegiatan pemetaan, pendampingan, serta aksi sosial terlaksana.

REFERENSI

- Azizah, A. N., Damayanti, F., Lestari, I., & Sahara, R. N. (2024). Peran UMKM terhadap perekonomian di Indonesia. *Ufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 553–556.
- Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'ain, N. I. (2024). Pentingnya pengurusan NIB sebagai instrumen legalitas usaha: Studi pada UMKM Jellicious dalam bingkai hukum bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*.
- Gainau, P. C., & Engk, C. (2024). Sistem pembayaran QRIS sebagai upaya pengembangan UMKM di Kota Ambon. *Journal of Business and Banking*, 13(2).
- Lado, V. E., & Nugraeni. (2025). Digitalisasi branding dan pembayaran pada UMKM Warung Lesehan Syadan melalui media sosial dan QRIS. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 23421–23427.

- Paransa, R. P. J. (2024). Optimalisasi pertumbuhan UMKM di Indonesia melalui pemasaran digital. *Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi*, 21(2), 164–181. <https://journal.uny.ac.id/index.php/efisiensi>
- Sholihah, E., & Nurhapsari, R. (2023). Percepatan implementasi digital payment pada UMKM: Intensi pengguna QRIS berdasarkan Technology Acceptance Model. *Jurnal Manajemen STIE Studi Ekonomi*.
- Ullah, I., Khan, M., Rakhmonov, D. A., Bakhritdinovich, K. M., Jacquemod, J., & Bae, J. (2023). Factors affecting digital marketing adoption in Pakistani small and medium enterprises. *Jurnal Logistics*.